KEMENTERIAN KEUANGAN RI							
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK							

UPNHN1GK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK				H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 1 0 9 9 H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan							
									Final		
SINERI ORAT GENGERAL FAGAR				H.2 Perinbetulan Re- U H.3 Perinbataian					Tidak Final		
A. ID	ENTITAS PE	NERIMA PENGHASIL	AN YANG	DIPOTONG							
A.1 NPWP : 3 5 1 7 2 5 2 5 4 7 2 2 0 0 0											
A.2 NIK :											
A.3 I	A.3 Nama : SYAFRUDDIN										
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG											
MASA PAJAK (mm-yyyy)		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)		DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)		TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)		
B.1 B.2		B.2	B.3		B.4		B.5	B.6	B.7		
3 21-402-01		699.300		699.300		0	5	34.965			
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota											
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 026/SP2D-GU/BLUD-RSJDAHM/III/2022											
Nama Dokumen Biaya Pembayaran						al 1 (6 dd 0 :	3 mm	2 0 2 2 <i>уууу</i>		
B.9	9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.										
	Nomor: Tanggal dd mm yyyyy										
B.10	PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :										
B.11											
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK											
C.1 NPWP Instansi Pemerintah :				3 3 5 0	16 2	7 2 2	0 0 0				
C.2	Nama Instan	NPWP Instansi Pemerintah : [9 5] [3 3 5] [0 1 6] [2] [7 2 2] [0 0 0 0] Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR						TIMUR			
C.3	C.3 ID Subunit Organisasi :								<u> </u>		
C.4	Tanggal : 1		1 6	dd 0 3 mm	2 0 2 2 yyyy				_		
C.5	Nama Penan	ma Penandatangan : HARI JUMADI									
C.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa buk tandatangani secara elektronik.						n/Pemungu	tan Unifikasi telah s	saya isi dengan	benar dan telah saya		
				dengan ketentuan yang nik sehingga tidak diperl		nderal Pajak	t mengatur bahwa d	dokumen ini tel	ah ditandatangani secara		